

VISI DAN MISI KEPALA DESA BANUT KALANAMAN

Visi-Misi Kepala Desa Banut Kalanaman disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Banut Kalanaman sebagai berikut:

“Banut Kalanaman **“CERAH”** untuk mewujudkan masyarakat yang maju **CERAH (Religius, Sehat, Aman, Sejahtera, Ekowisata, dan Terbuka)”**”.

Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Banut Kalanaman merupakan penjabaran lebih operasional dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Desa Banut Kalanaman

Dalam meraih visi Desa Banut Kalanaman seperti yang sudah dijabarkan diatas dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Banut Kalanaman *diantaranya*:

1. Menciptakan Birokrasi yang bersih, berkualitas, baik, terintegritas, konstruktif, inovatif, disiplin dan bertanggung jawab.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui kegiatan pelatihan, kesenian, agama, dan olahraga serta mengembangkan teknologi tepat guna dalam mengembangkan ilmu pengetahuan bagi masyarakat desa.
3. Menciptakan supermasi hukum dalam peran linmas dalam menjaga keamanan, dan ketertiban lingkungan bagi masyarakat desa.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur, pembangunan sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan untuk mengembangkan potensi wisata sebagai objek kesejahteraan masyarakat desa.
5. Meningkatkan kualitas peran kader-kader kesehatan dalam menciptakan masyarakat yang sehat.
6. Mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai ekonomi kesejahteraan masyarakat desa dalam menciptakan lapangan kerja.
7. Terbuka akan menjadi rujukan utama dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dalam pelaksanaan birokrasi.